

LAMPUNG SAI

VOLUME 3 2023

Hari Kemenkumham RI Ke-78
**SEMAKIN BERKUALITAS
UNTUK INDONESIA MAJU**



Rangkaian Kegiatan Peringatan

Hari Kemenkumham RI Ke-78
Kanwil Kemenkumham Lampung

Mobile Intellectual Property Clinic

Stafsus Menkumham, Fajar B.S. Lase Ajak
Masyarakat Melek Kekayaan Intelektual

Kumham Goes To Campus

Bersama Wamenkumham,
Bahas Paradigma Baru KUHP Nasional
di Hadapan Civitas Universitas Lampung



5 PESAN MENKUMHAM

Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.



- 1 **Utamakan Akuntabilitas
kedepankan Integritas**
- 2 **Bangun Sinergitas serta
manajemen organisasi
yang sehat dan cerdas**
- 3 **Jabatan adalah amanah,
terima dengan tanggung-
jawab dan tinggalkan
jejak yang baik**
- 4 **Kuasai pengelolaan dan
penggunaan anggaran
sesuai prinsip akunta-
bilitas dan transparansi**
- 5 **Perkuat sinergi dan
kolaborasi internal serta
bangun kerjasama tim
yang baik**

bangga
melayani
bangsa

KAMI ASN KEMENKUMHAM
BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI

➤ Berorientasi Pelayanan

1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Ramah, Cekatan, Solutif dan dapat Diandalkan.
3. Melakukan perbaikan tiada henti.

➤ Akuntabel

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.
2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

➤ Kompeten

1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
2. Membantu orang lain belajar.
3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

➤ Harmonis

1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
2. Suka menolong orang lain.
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

➤ Loyal

1. Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD NKRI tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
2. Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi & Negara.
3. Menjaga Rahasia jabatan & negara.

➤ Adaptif

1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
2. Terus berinovasi & mengembangkan kreativitas.
3. Bertindak proaktif.

➤ Kolaboratif

1. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
2. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah.
3. Menggerakkan Pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**SEMAKIN
PASTI**

**REFORMASI
HUKUM**



**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**

Dari Redaksi

Assalamualaikum Wr. Wb

Tabik pun...

Pada Volume 3 Tahun 2023 ini kami sajikan liputan khusus tentang Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Kemenkumham RI Ke-78

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan Tinggi Pratama dan semua pihak yang telah mendukung tim redaksi untuk berkarya serta terus-menerus melakukan inovasi dan pembaharuan.

Kami segenap redaksi mohon maaf apabila terdapat kesalahan tulisan. Semangat pembaharuan akan selalu mengiringi langkah tim redaksi untuk terus melakukan inovasi. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan selalu kami terima dengan sambutan hangat agar Buletin Lampung Sai semakin baik dan semakin PASTI. Salam Pembaharuan! Lampung Sai Pasti Kece! Pasti WBK!



Diterbitkan oleh: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung | **Pelindung:** Kepala Kantor Wilayah | **Pengarah:** Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Divisi Pemasarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian | **Penanggung Jawab:** Kepala Bagian Program dan Humas | **Pemimpin Redaksi:** Kepala Sub Bagian Humas RB & TI | **Tim Redaksi dan Redaktur Foto :** Damba Wiratama, Reza Khairulfitra, Rizqi D. Wardhanik, Nabil An Nafis, Odi Dewangga Y., M. Yusuf, Galang Syaelendra | **Desain Grafis dan Layout:** Nabil An Nafis

Daftar Isi



Liputan Khusus



08

Rangkaian Peringatan Hari Kemenkumham RI Ke-78, Kanwil Kemenkumham Lampung



Liputan Khusus



32

Kumham Goes To Campus, Bersama Wamenkumham, Bahas Paradigma Baru KUHP Nasional di Hadapan Civitas Universitas Lampung



40

Mobile Intellectual Property Clinic Lampung, Stafsus Menkumham, Fajar B.S. Lase Ajak Masyarakat Melek Kekayaan Intelektual



46

Strategi Krisis Komunikasi Media , Pelatihan Kehumasan UPT Pemasaryakatan



52

Bangun Sinergitas, Kanwil Kemenkumham Lampung terima Kunjungan Ketua DPD RI Provinsi Lampung



56

Peringatan Hari Anak Nasional Bersama Kakanwil dan Bunda Forum Anak Daerah (FAD) Lampung



Sekilas Info



60

Timeline Berita Singkat
Seputar Kemenkumham

Kamu Harus Tahu



62

Yuk Mengetahui Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang
ada di Kemenkumham





RANGKAIAN KEGIATAN PERINGATAN HARI KEMENKUMHAM RI KE-78

Semakin Berkualitas
untuk Indonesia Maju



21/08



Mengusung tema 'Semakin Berkualitas Untuk Indonesia Maju', Peringatan Hari Kementerian Hukum dan HAM ke-78 menjadi ajang silaturahmi segenap jajaran Kemenkumham serta peningkatan bakti kepada masyarakat untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045.

Dengan sinergi dan kolaborasi bersama seluruh unit pelaksana teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung berhasil menyelenggarakan rangkaian kegiatan seperti Bakti Sosial, pertandingan olahraga dan seni, serta Kegiatan Pelayanan Publik





Rangkaian kegiatan Hari Kemenkumham RI ke 78 dimulai dari Pembukaan Rangkaian Hari Kemenkumham 'HDKD' Ke-78 Tahun 2023.

Sebelum kegiatan dimulai, Sekretaris Jenderal, Komjen Pol. Andap Budi Revianto menyampaikan arahnya terkait Rangkaian Kegiatan HDKD ke-78. Andap berharap Dukungan Anggaran dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat sasaran.

"Usia 78 Tahun ini bukan usia yang muda, saya harapkan seluruh Jajaran mampu menjalankan amanah dengan baik dengan artian kita sebagai pelaksana, mari kita hiasi warna Kementerian Hukum dan





”

Dengan tema peringatan tahun ini, kita yakinkan publik bahwa Kemenkumham semakin berkualitas serta berkomitmen untuk mendukung agenda nasional guna mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Edward O.S. Hiariej ➤
Wamenkumham RI



Wamenkumham membuka rangkaian kegiatan Hari Kementerian Hukum dan HAM RI Ke-78



Arahan dari Sekretaris Jenderal, Komjen Pol. Andap Budi Revianto



HAM dengan baik dan benar. Tidak ada yang sempurna, saling mengingatkan dalam kebaikan." Ujar Andap. Sekretaris Jenderal juga berterimakasih atas kinerja Jajaran secara keseluruhan karena Kemenkumham memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ke-14.

Pembukaan HDKD ke-78 dimulai dengan Doa Kemenkumham untuk Negeri yang dipimpin lima pemuka agama, yakni Ustaz Abdul Hakim Wahid, Pendeta Herman Joseph Paais, Pastor Viktor Halomoan Habeahan, Ida Bagus Nyoman Sukadana, dan Bikku Riyadi.

"Teriring doa dan harapan agar keluarga besar Kemenkumham senantiasa diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam pengabdian untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penguatan nilai spiritual bagi Insan Pengayoman untuk terus memedomani nilai-nilai keagamaan sebagai pegangan untuk selalu bertindak baik," ujar Eddy.

Rangkaian kegiatan HDKD ke-78 ini bertema 'Kemenkumham Semakin Berkualitas untuk Indonesia Maju'. Eddy berharap seluruh

◀ Kakanwil Sorta Delima Lumban Tobing (kiri) mengikuti mengikuti Pembukaan Rangkaian Kegiatan secara Virtual

jajaran Kemenkumham bisa semakin dekat kepada masyarakat dan meningkatkan rasa cinta terhadap kementerian yang dipimpin Yasonna H Laoly ini.

"Berbagai macam bentuk kegiatan yang kita lakukan bertujuan agar kita terus dapat mendekatkan diri dan hadir di tengah masyarakat, semakin meningkatkan rasa kebersamaan, rasa kecintaan kita kepada organisasi, serta rasa memiliki sebagai keluarga besar Kemenkumham," kata Eddy.

"Dengan tema peringatan tahun ini, kita yakinkan publik bahwa Kemenkumham semakin berkualitas serta berkomitmen untuk mendukung agenda nasional guna mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," lanjutnya.

Eddy juga menyampaikan pesan Menkumham untuk terus berkomitmen memegang teguh amanah masyarakat dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tema peringatan HDKD ke-78 ini disebutnya menjadi pemacu semangat pengabdian terbaik.

"Persiapkan, rencanakan, dan laksanakan dengan baik dan sederhana. Saling mendukung dan sinergi dalam semangat kebersamaan agar rangkaian kegiatan berjalan dengan sukses dan sesuai harapan," tuturnya.

Berbagai kegiatan akan dilaksanakan untuk menyemarakkan HDKD ke-78, seperti kegiatan bidang olahraga hingga pelayanan masyarakat. Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto meminta jajaran Kemenkumham untuk terus menggelorakan semangat positif dan menjaga kehormatan Kemenkumham.

"Mari jaga kehormatan kita dengan baik dan pastikan kembali pekerjaan berkualitas," tegasnya.



◀ Bertempat di Aula Kanwil Kemnekumham Lampung, Seluruh Pegawai mengikuti Pembukaan Rangkaian Kegiatan secara Virtual



Pembukaan Pekan Olahraga

Memelihara Kesegaran Fisik Dan
Menumbuhkan Jiwa Sportif

14/07



▲
Pelepasan Balon oleh Kakanwil Serta tanda dibukanya
Pekan Olahraga Peringatan Hari Kemenkumham RI Ke-78

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Lampung menggelar upacara
pembukaan kegiatan Pekan
Olahraga yang merupakan
rangkaian peringatan Hari jadi
Kemenkumham, Hari Dharma
Karya Dhika Ke-78 Tahun 2023.
Jumat, (14/07/2023).

Upacara pembukaan
ini dilaksanakan di lapangan
upacara Kanwil Kemenkumham
Lampung dan dihadiri oleh
Kepala Kantor Wilayah, para
Kepala Divisi, serta para Kepala
Unit Pelaksana Teknis dan jajaran
pegawai dilingkungan Kanwil
Kemenkumham Lampung.

Diawali dengan laporan
pelaksanaan kegiatan, Kepala
Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Bandar Lampung
Maizar, membacakan laporan
pelaksanaan kegiatan dihadapan
Kakanwil dan peserta yang hadir.

Dalam laporannya, Maizar



menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, para Pimpinan Tinggi Pratama, para Kepala UPT se-Propinsi Lampung, Panitia dan semua pihak yang telah berpartisipasi memberikan segala bantuan baik moril maupun materil, sehingga Upacara Pembukaan Pekan Olahraga ini dapat berjalan dengan lancar.

Sementara itu, untuk pertandingan Pekan Olahraga Hari Dharma Karya Dhika, beberapa cabang yang akan dilombakan antara lain Badminton, Pertandingan Bola Volly, Futsal, Tennis Meja, Gaple, Catur, dan Tennis meja.

Selanjutnya, Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung Sorta Delima Lumban Tobing. Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan Pekan Olahraga ini bertujuan untuk



memelihara kesegaran fisik dan menumbuhkan jiwa sportif, serta yang lebih penting lagi adalah untuk memupuk rasa kebersamaan dan kekeluargaan diantara kita, diharapkan seluruh personil di jajaran kita selalu dalam kondisi kesehatan yang baik, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi serta senantiasa memelihara kesatuan dan persatuan.

Diakhir upacara, Kakanwil Sorta didampingi Para Kadiv dan Kepala UPT melakukan pelepasan balon udara menandakan dimulainya berbagai macam kegiatan dan perlombaan dalam rangka semarak HDKD ke-78 di lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung serta ditutup dengan penampilan atraksi dari Taruna Poltekkip 57

Gelar Legal Expo,

Warga Bandar Lampung Manfaatkan Layanan Publik di CFD Tugu Adipura

14/07



Kanwil Kemenkumham Lampung kembali menggelar Legal Expo dalam rangka memeriahkan Hari Kemenkumham RI ke-78. Berbagai pelayanan hukum dan HAM mulai dari pendaftaran kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, keimigrasian, pemasyarakatan hingga konsultasi hukum gratis dilayani dalam kegiatan tersebut.

Warga Bandar Lampung tampak antusias memanfaatkan Pelayanan Publik pada kegiatan Legal Expo yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung di Car Free Day (CFD) tepat di area Tugu Adipura (Bundaran Gajah), Bandar Lampung, Minggu (06/08). Beberapa warga memanfaatkan pelayanan dengan rencana akan mendaftarkan merek. Ada juga yang ingin mendaftar Perseroan Perorangan hingga bertanya terkait Paspas dan Pemasyarakatan. Kegiatan Legal Expo ini merupakan pameran / layanan publik yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan yang ada di Kantor Wilayah kepada masyarakat yang ada di Bandar Lampung dan sekitarnya

serta memang sengaja digelar pada hari Minggu mengingat banyak warga Bandar Lampung yang kesulitan mengakses pelayanan publik selama hari kerja.

Selain itu, Kanwil Kemenkumham Lampung juga menyoal pusat keramaian seperti CFD dengan harapan, masyarakat bisa sekaligus menikmati akhir pekan sambil memenuhi kebutuhan akan pelayanan publik di Kemenkumham



▲
Petugas Legal Expo siap memberikan pelayanan kepada pengunjung car free day

Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan

upacara penghormatan dan doa untuk para pahlawan yang telah gugur,

09/08



Upacara Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan Kota Bandar Lampung

Dalam suasana penuh khidmat dan penghormatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menyelenggarakan ziarah dan upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Bandar Lampung sebagai momentum memperingati Hari lahir Kementerian Hukum dan HAM ke-78 Tahun 2023. Rabu (09/08/2023).

Kegiatan dimulai dengan upacara penghormatan dan doa untuk para pahlawan yang telah gugur, yang diikuti dengan momen mengheningkan cipta. Kakanwil Sorta, sebagai inspektur upacara, mengajak seluruh peserta untuk merenungkan makna di balik setiap perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada tanah air. Salah satu momen berkesan adalah peletakan karangan

bunga di Monumen Taman Makam Pahlawan (TMP) Bandar Lampung. Kakanwil Sorta dan para Pimpinan Tinggi Pratama lainnya dengan penuh hormat mengiringi peletakan karangan bunga sebagai tanda penghargaan kepada para pahlawan dan pejuang bangsa yang telah memberikan pengorbanan terbaiknya.

Layanan Paspor Merdeka

UPT Keimigrasian Kanwil Lampung Sambut HUT Kemenkumham RI Ke-78

05/08



Dalam Rangka Semarak Dirgahayu Republik Indonesia dan Hari Kementerian Hukum dan HAM RI ke-78. Serentak 162 Kantor Imigrasi Seluruh Indonesia Pada Hari Ini Buka Layanan Paspor Merdeka, Sabtu (05/8). Di layanan Paspor Merdeka ini masyarakat bisa melakukan permohonan paspor baru, penggantian habis masa berlaku paspor, dan percepatan paspor 1 hari jadi.

Salah satu dari 162 Kantor Imigrasi di Indonesia yaitu Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI

Kalianda buka 30 Kuota layanan Paspor Merdeka di PT. Jafa Indo Corpora Cabang Lampung yang bertempat di Jl. Pulau Damar No.99 Perumnas Waykandis Kec. Tanjung Senang. dan Dua titik layanan lainnya yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi buka layanan paspor merdeka di masing-masing Kantor Imigrasi.

Bagi yang akan membuat paspor baru melalui layanan Paspor Merdeka ini, pastikan untuk membawa berkas yang dibutuhkan seperti e-KTP,

Kartu Keluarga, dan Akte Lahir. Sementara jika ingin melakukan penggantian paspor maka cukup membawa e-KTP dan paspor lama.

Pada praktiknya, setelah proses verifikasi berkas persyaratan selesai kemudian dilanjutkan dengan pengambilan data biometrik berupa foto wajah dan sidik jari serta tahap wawancara. Proses pembayaran Paspor Merdeka bisa dilakukan baik secara offline maupun via online banking, kantor pos, Indomaret, dan marketplace.



Pelayanan Paspor Merdeka di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung

Lakukan Penyuluhan Hukum Serentak

Penyuluh Hukum Kanwil Lampung adakan sosialisasi UU No.1 Th. 2023 Tentang KUHP bersama LKBH SPSI

09/08



Penyuluhan Hukum Sosialisasi UU No. 1 Tahun 2023

Kegiatan penyuluhan hukum serentak merupakan langkah besar yg dilakukan oleh BPHN untuk mengintruksikan kepada Kantor Wilayah Kemenkumham se-Indonesia untuk melakukan Penyuluhan Hukum Serentak terkait dengan dengan Tema "Sosialisasi UU No. 1 Tahun 2023"

Hasan Nur Em Rasyid, S.H. selaku Narasumber dari YLKBH-SPSI LAMPUNG menjelaskan apa yang melatar belakangi adanya pembaruan KUHP salah satunya yaitu Upaya menghilangkan

nuansa Kolonial dalam substansi KUHP. Bahwa Highlight contoh kasus Tindak Pidana baru salah satunya kabarnya KUHP baru mengatur Pidana Santet, namun sebenarnya KUHP baru tidak mengatur Pidana Santet tetapi yang dipidana adalah orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib yang dapat menimbulkan penyakit, kematian dan penderitaan mental atau fisik.

M. Ridwan S.H. selaku Direktur YLKBH-SPSI LAMPUNG setelah pemaparan disampaikan oleh Narasumber juga memantik

peserta dalam Kegiatan tersebut untuk lebih memahami Hukum. Beliau bertanya kepada para peserta mengenai definisi hukum, Kemudian kembali menjelaskan betapa pentingnya memahami KUHP baru.

Kanwil Kemenkumham Lampung sangat mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini, dan berharap agar setelah terlaksananya penyuluhan ini masyarakat menjadi mengerti dan memahami mengenai KUHP baru terutama pada saat diberlakukan nanti di tahun 2025.

Donor Darah

Sambut HUT Kemenkumham RI Ke-78

25/07



Menyambut Hari Kementerian Hukum dan HAM RI ke-78, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia Kota Bandar Lampung mengadakan donor darah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung pada hari ini, Selasa (25/07). Donor darah yang dilaksanakan ini diikuti oleh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, UPT Pemasarakatan dan Imigrasi di sekitar Kota Bandar Lampung.

Turut hadir juga Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung, Dr. Sorta Delima Lumban Tobing; Kepala Divisi Keimigrasian, Teodorus Simarmata; dan Kepala Bagian Umum, Denial Arif; untuk turut meninjau jalannya kegiatan Donor Darah dalam Rangka peringatan Hari Kementerian Hukum dan HAM RI ke-78 ini.

Dalam kegiatan donor darah hari ini, tercatat 118 orang pegawai telah mendaftar dengan hasil 109 berhasil menjadi pendonor dan 9 orang tidak berhasil dikarenakan beberapa

alasan seperti hb kurang dari batas yang ditentukan, tensi kurang dan sedang konsumsi obat.

Dengan terselenggarakannya kegiatan Donor Darah hari ini, diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan darah dan memenuhi permintaan darah yang meningkat ke Palang Merah Indonesia. Semoga kedepannya kegiatan donor darah dapat lebih sering digalakkan pada setiap kesempatan



▲
Kepala Divisi Keimigrasian, Teodorus Simarmata ketua panitia donor darah didampingi dr. Nathalia Christina Simanungkalit meninjau jalannya kegiatan

Perlombaan Permainan Tradisional

Meriahkan HUT RI ke-78

05/08



Peserta lomba tradisional estafet tepung terlihat antusias

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Lampung menggelar serangkaian perlombaan permainan tradisional. Jumat (18/08/2023).

Perlombaan permainan seluruh pegawai dilingkungan kanwil Kemenkumham Lampung. Perlombaan yang berlangsung meriah di halaman kantor wilayah diawali dengan

serangkaian perlombaan permainan tradisional yang mengundang antusiasme dari semua peserta. Perlombaan Makan Kerupuk, Balap Karung, Lari Balon, Balap Kelereng dengan Sendok, Memasukan Paku Kedalam Botol, Memindahkan Air dengan Spons, Estafet Sarung, serta Estafet Tepung turut menjadi bagian dari acara tersebut.

Semangat tinggi terpancar dari peserta yang mengikuti perlombaan ini. Suasana ceria

dan semangat yang tinggi terlihat dari pelaksanaan beragam perlombaan tradisional yang menjadi fokus utama perayaan HUT RI Ke-78 ini.

Kepala Divisi Administrasi M.Ikmal Idrus menyampaikan, "Kami sangat gembira melihat antusiasme dan semangat dari seluruh peserta acara. Ini adalah momentum berharga yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memupuk rasa kebersamaan dan kebanggaan akan tanah air."

5.757 WBP Terima Remisi Umum

Dalam Rangka HUT RI ke-78

17/08



Berempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, Pada peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema “Terus Melaju Untuk Indonesia Maju” dan Acara Pemberian Remisi Umum Tahun 2023 kepada Narapidana dan Anak di Lapas/ Rutan seluruh Provinsi Lampung, sebanyak 5.757 (Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh) orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lampung yang terdiri dari Remisi Umum I (RU I)

sebanyak 5.735 (Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima) orang dan Remisi Umum II (RU II / Langsung Bebas) sebanyak 77 (Tujuh Puluh Tujuh) orang, Kamis (17/08/2023)

Acara dibuka dengan Laporan oleh Kakanwil Kemenkumham Lampung. Dalam laporannya, Sorta menyampaikan bahwa di hari Kemerdekaan yang dipenuhi rasa syukur ini pemberian remisi merupakan Hak yang sepatasnya di dapatkan oleh WBP. tentunya Remisi ini diberikan kepada WBP yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan amanat ketentuan perundang undangan yang berlaku (Administratif dan Substantif).

“Momentum peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia ini juga diperingati dengan pemberian Remisi Umum 17 Agustus bagi narapidana yang diselenggarakan bertepatan dengan Upacara Peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. Pemberian remisi dilakukan untuk meningkatkan rasa kebangsaan bagi narapidana sekaligus memenuhi hak narapidana.” Ujar Sorta.

Dalam menutup laporannya, Sorta juga berharap





▲ Sekda Prov. Lampung, Fahrizal Darminto memberikan SK Remisi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan

dengan adanya kegiatan ini, Warga Binaan Pemasyarakatan merasa semangat dan diperhatikan serta mendapatkan dukungan dari para stakeholder dan mitra kerjasama agar selepas dari Lapas atau Rutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan mandiri. "Kegiatan ini harus terus dilaksanakan setiap tahunnya." Tutup Sorta.

Dilanjutkan Sambutan oleh Gubernur Provinsi Lampung, dalam hal ini di wakili oleh Sekda Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto yang berpesan bagi seluruh warga binaan yang mendapatkan remisi pada hari ini. "manfaatkanlah momen ini sebagai sebuah motivasi untuk tetap berperilaku baik, taat pada aturan, dan tetap mengikuti program pembinaan dengan tekun dan bersungguh-sungguh," ujar Fahrizal.

Taklupa, Fahrizal juga mengucapkan selamat kepada Warga Binaan yang mendapatkan Remisi Umum di Hari Kemerdekaan RI ke-78 ini.



Tanamkan dalam benak saudara sekalian bahwa proses yang saudara jalani adalah sebuah proses pendidikan dan pembinaan untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih kuat dan lebih bermartabat dari sebelumnya

Fahrizal Darminto ➤
Sekda Prov. Lampung

UPACARA HUT KEMENKUMHAM RI KE-78



Kemenkumham Semakin Berkualitas Untuk Indonesia Maju

21/08



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menggelar upacara bendera dalam rangka Hari Lahir Kemenkumham Ke-78 Tahun 2023. Helat yang biasanya dilaksanakan setiap tahun pada 19 Agustus, kali ini upacara

digelar pada Senin (21/08) di lapangan Kantor Wilayah. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Dr. Sorta Delima Lumban Tobing membacakan amanat Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.



▲
Upacara Peringatan HUT Kemenkumham RI Ke-78 di Lapangan Upacara Kanwil Kemenkumham Lampung

Dalam amanatnya, Kakanwil menyampaikan makna dari tema “Kementerian Hukum dan HAM Semakin Berkualitas untuk Indonesia Maju” yang diusung tahun ini.

“Upaya merefleksikan semangat segenap insan pengayoman di seluruh Indonesia dalam memberikan pengabdian terbaik dari waktu ke waktu yang diharapkan juga semakin berkualitas,” ungkapnya.

Pada momentum ini, ia menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah daerah, instansi vertikal, mitra kerja, dan segenap aparatur sipil negara atas kehadiran, kerjasamanya, dan penghargaan yang diberikan.



”

Upaya merefleksikan semangat segenap insan pengayoman di seluruh Indonesia dalam memberikan pengabdian terbaik dari waktu ke waktu yang diharapkan juga semakin berkualitas

Sorta Delima Lumban Tobing ➤
Kakanwil Kemenkumham Lampung





Kakanwil Sorta serahkan piagam penghargaan kepada Bupati Lampung Utara atas Pemberian Hibah Tanah dan Fasilitas Penunjang Berjalannya Tusi Kanim Kelas II Non TPI Kotabumi

Tercatat dalam kurun waktu setahun kebelakang, Kementerian Hukum dan HAM telah berhasil meraih peringkat pertama implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dan kinerja terbaik dalam pengelolaan anggaran, mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 14 kali.

Selain itu ada pula penghargaan dari Kementerian PAN-RB atas Sinergitas Pengadaan Calon ASN dan Tata Kelola Sekolah Kedinasan yang informatif untuk pertama kalinya, raihan penghargaan sebagai badan public yang informatif, dan penghargaan penerapan layana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atas 26 layanan publik yang dimiliki.

jangan ada lagi penyalahgunaan tugas dan wewenang, tidak ada perilaku pegawai yang melanggar disiplin kode etik, dan melanggar hukum. Melainkan para Insan Pengayoman harus meningkatkan kemampuan dan kompetensi masing-masing individu dan



Untuk mempertahankan semua penghargaan tersebut, Sorta mengimbau



”

Jangan ada lagi penyalahgunaan tugas dan wewenang, tidak ada perilaku pegawai yang melanggar disiplin kode etik, dan melanggar hukum. Melainkan para Insan Pengayoman harus meningkatkan kemampuan dan kompetensi masing-masing individu dan mempublikasikan serta glorifikasi berbagai capaian dan prestasi instansi guna meraih kepercayaan masyarakat.

Sorta Delima Lumban Tobing ➤
Kakanwil Kemenkumham Lampung



mempublikasikan serta glorifikasi berbagai capaian dan prestasi instansi guna meraih kepercayaan masyarakat.

Mengakhiri amanat, Kakanwil menyampaikan pesan Menteri Hukum dan HAM kepada seluruh jajaran Kemenkumham. Pesan-pesan tersebut antara lain: mempersiapkan transisi dari pandemi menuju endemi; menyelesaikan tahun anggaran 2023 dengan baik, Kelola keuangan secara tertibm efisien, efektif, dan bertanggung





jawab; mempersiapkan lebih baik lagi dalam rangka Rencana Kerja tahun 2024; tetap cermat dalam bekerja, lakukan pengawasan pengendalian di jajarannya, teruslah saling mengingatkan untuk selalu taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan; menjaga netralitas aparaturnya demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa khususnya saat memasuki tahun politik dan pelaksanaan Pemilu di tahun 2024.

Dalam upacara kali ini juga ada penyerahan Penghargaan kepada Bupati Lampung Utara atas Pemberian Hibah Tanah dan Fasilitas Penunjang Berjalannya Tusi Kanim Kelas II Non TPI Kotabumi, Penghargaan Kepada OBH Sejahtera Bersama Lampung atas Penyerapan Anggaran Litigasi dan Non Litigasi Terbaik Tahun Anggaran 2022, Penghargaan Kepada Rutan Sukadana atas Kinerja Publikasi Kehumasan terbaik, Penghargaan kepada pegawai pada UPT Pemasarakatan dan Imigrasi atas prestasi yang diukirnya dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Kegiatan Upacara ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Kakanwil sebagai wujud rasa syukur Hari Kemenkumham RI ke-78, "Kemenkumham Semakin Berkualitas, Untuk Indonesia Maju".



KUMHAM GOES TO CAMPUS



Bersama Wamenkumham, Bahas Paradigma Baru KUHP Nasional di Hadapan Civitas Universitas Lampung



17/06



Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan Kumham Goes to Campus sebagai bentuk upaya rutin Kemenkumham memberikan edukasi secara luas pada universitas di Indonesia seputar Hukum dan HAM. Tahun

2023 ini, Universitas Lampung (Unila) menjadi yang ke-15 dari 16 universitas yang dikunjungi, dengan Unila terpilih menjadi tuan rumah, dengan demikian Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung mendapat kehormatan menjadi bagian dari penyelenggara acara nasional tahunan ini.

Pada Kamis (3/8) Mengambil tempat di Gedung D Fakultas Hukum Unila, Kumham Goes to Campus dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Lampung, Sorta Delima Lumban Tobing; Kepala Divisi Administrasi, M. Ikmal Idrus; Kepala Divisi Pemasyarakatan, Farid Junaedi; Kepala Divisi Keimigrasian, Theodorus Simarmata; Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alpius Sarumaha; Para Kepala Unit Pelayanan Teknis Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung. Turut menghadiri, Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana beserta segenap Forkompinda, dan Rektor Unila, Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M.

Dalam sambutannya mengawali rangkaian acara, Rektor Unila menyampaikan bahwa Unila merupakan universitas Ke-15 dalam rangkaian Kumham Goes to Campus ini, dirinya menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama antara universitas dan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam hal sosialisasi tugas dan fungsi Kemenkumham. Prof.



Prof. Edy bersama Rektor Unila, Prof. Lusmeilia Afriani ▶



”

Paradigma lama yang perlu diubah adalah paradigma yang menganggap penerapan hukum pidana merupakan wujud dari keadilan retributif (lex talionis) atau hukum pembalasan. Sedangkan paradigma baru dalam KUHP Nasional ini berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif.

Edward O.S. Hiariej ➤
Wamenkumham RI



▲ Pinti Pratama didampingi Kepala UPT turut mengikuti jalannya kegiatan

Lusmeilia berharap kegiatan ini dapat membuka wawasan dan memberikan ilmu pengetahuan baru bagi para pesertanya. Tak lupa Rektor Unila periode 2023 – 2027 ini juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Prof. Edward O. S. Hiariej tau yang akrab disapa Prof. Eddy ini, dalam kesempatannya sebagai pembicara kunci memaparkan bahwa tujuan dari rangkaian Kumham Goes to Campus adalah untuk memperkenalkan, menumbuhkan kesadaran

Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari saat memberikan sambutan kepada civitas akademica ▶

akan peran Kemenkumham dan mendekatkan Kementerian Hukum dan HAM kepada masyarakat. Pada kesempatan ini Prof. Edy,

mengangkat dan mengupas topik seputar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Dirinya





◀ Kakanwil Sorta turut mengikuti jalannya Kumham Goes To Campus Unila



▲ Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana turut hadir dalam acara Kumham Goes To Campus



mengungkapkan bahwa rangkaian upaya hingga KUHP Nasional ini disahkan telah melalui suatu proses yang panjang, yakni 65 tahun. Dimulai sejak tahun 1958, dibahas di DPR pada tahun 1963 hingga disahkan di tahun 2023 ini. Kini, Prof. Eddy menambahkan, KUHP Nasional memasuki masa transisi yang akan berlangsung selama 3 tahun. Dalam masa transisi ini perlu dilakukan banyak sosialisasi dalam rangka mengubah mindset, pola pikir dan paradigma dalam masyarakat.

Paradigma lama yang perlu diubah adalah paradigma yang menganggap penerapan hukum pidana merupakan wujud dari keadilan retributif (lex

talionis) atau hukum pembalasan. Sedangkan paradigma baru dalam KUHP Nasional ini berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif. Dengan paradigma ini, pidana penjara kini menjadi pilihan pamungkas dalam penjatuhan hukuman guna mencegah penjatuhan pidana penjara dengan durasi yang singkat. Di mana keadilan korektif ini ditujukan untuk pelaku, keadilan restoratif kepada korban dan keadilan rehabilitatif bagi ke dua belah pihak lebih dikedepankan, sambung Prof. Eddy.

Terdapat 5 (lima) misi dari diberlakukannya KUHP Nasional ini, yaitu: 1). Demokratisasi

mengakkan kebebasan yang diatur dalam undang-undang; 2). Dekolonisas, menghilangkan nuansa kolonialisme; 3). Konsolidasi, menghimpun berbagai ketentuan pidana di luar dekodefikasi; 4). Harmonisasi, penyetaraan substansi peraturan; dan 5). Modernisasi, melepaskan paradigma lama yang berorientasi pada hukum sebagai pembalasan. Mengakhiri paparannya Wakil Menteri Hukum dan HAM RI menyampaikan yang perlu dilakukan pemerintah pada 3 masa transisi ini adalah sosialisasi pada semua kalangan termasuk aparat penegak hukum hingga akademisi dan membentuk peraturan pelaksana dari KUHP Nasional.



Acara dilanjutkan dengan pemaparan oleh para narasumber dengan topik yang masing-masing berkaitan dengan KUHP Nasional yang dipaparkan oleh pembicara kunci, yakni:

- a. Prof. Harkristusti Harkrisnowo – Pidana dan Pemidanaan;
- b. Taufik Basari – Membaca KUHP Baru dengan Paradigma Baru;
- c. Dr. Surastini Fitriasih – Kebaruan Hukum Pidana;
- d. Dr. Yenti Garnasih – TP Khusus & TP Baru UU KUHP

”

Pidana penjara kini menjadi pilihan pamungkas dalam penjatuhan hukuman guna mencegah penjatuhan pidana penjara dengan durasi yang singkat. Di mana keadilan korektif ini ditujukan untuk pelaku, keadilan restoratif kepada korban dan keadilan rehabilitatif bagi ke dua belah pihak lebih dikedepankan

Edward O.S. Hiariej ➤
Wamenkumham RI

MOBILE INTELLECTUAL PROPERTY CLINIC



◀ Stafus Menkumham membuka kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic Lampung

Stafsus Menkumham, Fajar B.S. Lase Ajak Masyarakat Melek Kekayaan Intelektual

25/07



Membuka sosialisasi "Mobile Intellectual Property Clinic", Staf Khusus Menteri Hukum & HAM (Menkumham) RI Bidang Transformasi Digital Fajar B.S. Lase bagikan pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kepada masyarakat Lampung di Hotel

Radison, Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung. Selasa, (25/7/2023).

Kegiatan ini merupakan rangkaian safari pelaksanaan Mobile Intellectual Property (IP) Clinic di seluruh Indonesia dan pada kesempatan ini bertempat di Provinsi Lampung.





Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Alpius Sarumaha, Kepala Divisi Pemasyarakatan Farid Junaedi, Pejabat Administrator, dan Pengawas dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung serta Para Kepala Daerah Bupati/ Walikota atau perwakilan yang menghadiri kegiatan dari beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Lampung dan juga para tamu undangan

sebanyak 150 orang.

Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung Sorta Delima Lumban Tobing, Kadiv Yankumham Alpius Sarumaha memberikan sambutan serta membacakan laporan kegiatan dan menyampaikan bahwa Sosialisasi MIC bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengembangan Kekayaan Intelektual bagi Masyarakat di Provinsi Lampung.



Penyerahan Sertifikat Merek oleh Stafus Fajar Lase



”

Mobile Intellectual Property Clinic merupakan implementasi dari Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan salah satu program unggulan dari DJKI yang hadir ditengah masyarakat, melalui sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat merasakan kehadiran dan manfaatnya





▲
Fajar Lase membuka layanan Mobile Intellectual Property Clinic

Membuka sosialisasi MIC, Staf Khusus Menkumham Fajar BS Lase menyampaikan bahwa MIC adalah implementasi dari Kemenkumham. "Mobile Intellectual Property Clinic merupakan implementasi dari Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan salah satu program unggulan dari DJKI yang hadir ditengah masyarakat, melalui sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat merasakan kehadiran dan manfaatnya," Ujar Fajar.

Pada acara tersebut, diadakan juga penandatanganan nota kesepahaman antara Kanwil Kemenkumham Lampung dengan Kepala Daerah Bupati/ Walikota, sebagai momen keberlanjutan kerjasama dalam peningkatan perkembangan Kekayaan Intelektual di daerah tersebut. Kemudian juga dilakukan Surat pencatatan KIK Kepada perwakilan Bupati Lampung Tengah serta penyerahan Sertifikat Merek Kepada Pemegang Merek "Gloria Agro" dan Pemegang Merek "Skafasa".

Perlu diketahui bahwa tercatat bahwa hingga bulan Juli 2023, terdapat 385 permohonan Merek, 4

permohonan Paten, 5 permohonan Desain Industri, dan 964 Surat Pencatatan Cipta di Provinsi Lampung.

Setelah resmi dibuka oleh Staf Khusus Menkumham Fajar BS Lase, Kegiatan dilanjutkan dengan Sosialisasi MIC dengan narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, dan perwakilan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Acara tersebut memberikan layanan konsultasi dan pendampingan pendaftaran Merek, Cipta, Paten, dan Desain Industri bagi masyarakat yang membutuhkan.

Buka Pameran Layanan Kekayaan Intelektual di Mall Bumi Kedaton

Pameran terpadu secara resmi dibuka dengan prosesi pemotongan pita oleh Staf Khusus Menkumham Bidang Transformasi Digital, Fajar BS Lase didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alpius Sarumaha; Kepala Divisi Pemasarakan, Farid Junaedi; dan disaksikan oleh Wakil Bupati Lampung Timur, Azwar Hadi.



▲
Fajar Lase meninjau booth pameran produk kekayaan intelektual

Dalam sambutannya, Fajar BS Lase berharap dengan adanya pameran pelayanan ini dapat meningkatkan antusiasme masyarakat untuk mendaftar kekayaan intelektual.

"Untuk masyarakat Lampung melalui pelayanan jemput bola ini mari segera daftarkan kekayaan intelektual anda" ucap Fajar.

Dilanjutkan dengan meninjau booth pelayanan dan konsultasi serta booth pameran produk kekayaan intelektual, Fajar Lase mengapresiasi produk-produk khas Lampung yang dipamerkan seperti, kain tapis, kopi Lampung, dll



▲
Booth pelayanan dan konsultasi layanan Mobile Intellectual Property Clinic

PELATIHAN KEHUMASAN UPT PEMASYARAKATAN



◀ Kepala Divisi Pemasarakatan membuka kegiatan Pelatihan kehumasan yang dihadiri seluruh jajaran UPT Pemasarakatan



Strategi Krisis Komunikasi Media

13/09



Humas berperan penting dalam menangani komunikasi krisis di Kementerian Hukum dan HAM RI yang beresiko tinggi diterpa isu miring atau negatif. Untuk itu, jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung terutama pada UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pemasyarakatan berupaya memperkuat peran humas dalam situasi krisis komunikasi dengan menggelar Kegiatan Pelatihan Kehumasan dengan tema Strategi Krisis Komunikasi Media. Rabu (13/9/2023).





Bertempat Di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung kegiatan diikuti oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dan Tim Humas pada masing-masing UPT Pemasarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung.

Membuka Kegiatan Kepala Divisi Pemasarakatan, Dr. Farid Junaedi; dalam sambutannya menyampaikan bahwa peran humas di era kemajuan teknologi dan informasi sekarang bukan lagi hanya sebagai penyampai informasi. Melainkan menjadi salah satu unsur strategis dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan progam yang dilakukan setiap harinya.

“Dengan adanya kegiatan ini saya berharap kepada Tim Humas khususnya pada UPT Pemasarakatan segala bentuk kegiatan positif sehari-hari didalam Lapas/Rutan/LPKA dapat diketahui dan diakses masyarakat sehingga dapat tersebar secara luas dan mampu memberikan pandangan positif kepada masyarakat” Ucap Kadivpas.

Selanjutnya Kepala UPT dan Tim Humas UPT Pemasarakatan jajaran Kanwil kemenkumham Lampung diajarkan untuk memahami manajemen Krisis Pemasarakatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan untuk melakukan penanganan

yang cepat dan tepat ketika terjadi situasi krisis. Materi ini disampaikan oleh Narasumber yaitu Praktisi Komunikasi Publik, M. Bahrul Wijaksana;

Pria yang sering disapa Uung ini menyampaikan Manajemen krisis ini dapat dilakukan melalui penyusunan rencana komunikasi krisis dan strategi penyampaian informasi bagi Tim Humas yang ada di UPT Pemasarakatan di Wilayah Lampung.

Disampaikan olehnya, Strategi dalam penyampaian informasi untuk memperkuat pemahaman, membangun ketertarikan dan keterlibatan



◀ Tim Humas Pemasyarakatan mengikuti menyimak materi dari narasumber

”

Dengan adanya kegiatan ini saya berharap kepada Tim Humas khususnya pada UPT Pemasyarakatan segala bentuk kegiatan positif sehari-hari didalam Lapas/Rutan/LPKA dapat diketahui dan diakses masyarakat sehingga dapat tersebar secara luas dan mampu memberikan pandangan positif kepada masyarakat

Farid Junaedi ➤

*Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kanwil Kemenkumham Lampung*



▲
Diskusi Tim Humas Lapas Narkotika Bandar Lampung didampingi Kalapas Porman Siregar

publik, serta mendorong dukungan pembuat kebijakan dalam pelaksanaan sistem Pemasyarakatan. Tim Humas Pemasyarakatan diharapkan mampu mengelola informasi dan isu strategis Pemasyarakatan, sarana refleksi dan evaluasi pelaksanaan sistem Pemasyarakatan, menjelaskan kebijakan nasional Pemasyarakatan, serta mengelola wadah partisipasi masyarakat.

Diketahui kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini 13 s.d 14 September 2023 dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Dr. M. Ikmal Idrus; Kepala Divisi Keimigrasian, Teodorus Simarmata; Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr. Alpius Sarumaha

Salah satu poin kunci dalam pelatihan ini adalah

penekanan pada Pesan Kunci atau Key Message. Pesan kunci ini dianggap sebagai elemen utama dalam mengelola komunikasi saat menghadapi situasi krisis. Pentingnya menyampaikan pesan yang konsisten oleh semua pihak yang terlibat dalam komunikasi sangat ditekankan.

Selain teori, pelatihan ini juga melibatkan praktek langsung. Peserta diajak untuk terlibat dalam simulasi wawancara yang meniru situasi komunikasi krisis dalam dunia nyata. Hal ini bertujuan untuk membantu peserta mengembangkan keterampilan komunikasi mereka dalam situasi yang mungkin sulit.

Selain itu, pelatihan juga fokus pada memastikan bahwa pesan yang disampaikan oleh tim Humas konsisten dengan persepsi jurnalis. Hal ini bertujuan untuk

menghindari miss informasi dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada media bersifat jelas dan konsisten.

Kegiatan pelatihan ini juga mengajarkan peserta bagaimana menghadapi berbagai jenis krisis komunikasi dengan tenang, efektif, dan profesional. Ini termasuk dalam penanganan isu-isu sensitif dan mengelola dampak negatif yang mungkin muncul.

Melalui pelatihan ini, Kanwil Kemenkumham Lampung berharap dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman tim Humas dalam mengelola komunikasi dalam situasi krisis. Dengan begitu, mereka siap untuk menghadapi tantangan komunikasi kepada masyarakat yang mungkin muncul di waktu mendatang.



”

Tim Humas Pemasyarakatan diharapkan mampu mengelola informasi dan isu strategis Pemasyarakatan, sarana refleksi dan evaluasi pelaksanaan sistem Pemasyarakatan, menjelaskan kebijakan nasional Pemasyarakatan, serta mengelola wadah partisipasi masyarakat



BANGUN SINERGITAS

Kanwil Kemenkumham Lampung terima Kunjungan Ketua DPD RI Provinsi Lampung

13/07



▲
Kakanwil Sorta menerima cendera mata dari
Ketua DPD RI Prov. Lampung



Kakanwil Sorta menyambut Rombongan DPD RI Provinsi Lampung

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung terima kunjungan dari Ketua DPD RI Provinsi Lampung. Audiensi tersebut diadakan di Ruang Kepala Kantor Wilayah dengan tujuan utama untuk menjalin silaturahmi, memperkuat sinergi dan meningkatkan kerja sama antara kedua instansi. Kamis, (13 Juli 2023).

Rombongan DPD RI Provinsi Lampung yang terdiri dari Ketua Gino beserta rombongan tiba di Kantor Wilayah dan disambut secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Sorta Delima Lumban Tobing, Kepala Divisi Administrasi M.Ikmal Idrus, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Alpius Sarumaha, dan Kepala Divisi Keimigrasian Teodorus Simarmata.



Kedua belah pihak berharap dapat saling bekerja sama dan berkontribusi secara sinergis dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di wilayah Lampung.



▲
Penyerahan cendera mata oleh Kakanwil Sorta kepada Ketua DPD RI Prov. Lampung

Kunjungan ini bukan sekadar pertemuan formal, tetapi juga sebagai wadah untuk memperkuat hubungan kedua belah pihak. Selain silaturahmi, tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk menjalin sinergi antara Kanwil Kemenkumham Lampung dengan DPD RI Provinsi Lampung. Kedua belah pihak berharap dapat saling bekerja sama dan berkontribusi secara sinergis dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Gino menyampaikan

apresiasi dan terima kasih kanwil Kemenkumham Lampung atas penerimaan mereka. Ia juga menegaskan pentingnya kerja sama antara kedua instansi untuk mencapai tujuan bersama dalam melindungi hak-hak warga negara dan menjalankan tugas masing-masing secara efektif.

Kepala Kantor Wilayah Sorta Delima Lumban Tobing menyambut baik niat baik dari DPD RI Provinsi Lampung dan menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara kedua belah pihak. Ia menekankan bahwa kerja sama yang solid dan sinergis

akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Lampung secara keseluruhan.

Pertemuan diakhiri dengan penyerahan plakat dari Kanwil Kemenkumham Lampung dan Pemberian Cendera Mata dari DPD RI Provinsi Lampung sebagai bentuk apresiasi antar kedua Instansi. •



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH LAMPUNG

Resolusi Kemenkumham Tahun 2023



Wujudkan
Kementerian
Hukum dan HAM
Semakin PASTI
dan **BerAKHLAK**

dengan bekerja secara
cepat, tepat, ikhlas
dan hasilnya
akuntabel

Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI

MERIAH, PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL 2023

Bersama Kakanwil dan Bunda Forum
Anak Daerah (FAD) Lampung

02/08



Foto bersama peringatan Hari Anak Nasional
di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung



◀ Bunda Forum Anak Daerah Lampung, Riana Sari Arinal didampingi Kakanwil Sorta disambut oleh petugas

Mewakili Sambutan Gubernur Lampung, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri menyampaikan bahwa Hari Anak Nasional merupakan momentum untuk memberikan aksi nyata pemenuhan Hak Asasi Anak untuk mendapatkan pendidikan, fasilitas kesehatan, perlindungan, serta pembinaan akhlak dan budi luhur.

Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Dr.Sorta Delima Lumban Tobing dalam sambutannya menyampaikan bahwa Penyelenggaraan HAN Tahun 2023 merupakan peringatan ke-39 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 yang disahkan pada 19

Peringatan HAN merupakan momentum untuk menggugah kepedulian & partisipasi seluruh komponen bangsa Indonesia dalam menjamin pemenuhan hak anak atas hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, tak terkecuali bagi seluruh Anak Binaan pada LKPA Bandar Lampung

Fitrianita Damhuri ➤

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung



Juli 1984.

Penyelenggaraan HAN ini sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa, serta upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah anak sehingga anak Indonesia dapat menjadi agen perubahan dalam menyuarakan hak-haknya.

“Hal ini menjadi salah satu tugas kami pada LPKA untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anak binaan agar kedepannya mereka tetap memiliki masa depan, semangat hidup, dan memiliki akhlak yang mulia sehingga saat dewasa nanti tidak mengulangi kesalahannya serta bermanfaat bagi masyarakat”



kata Sorta.

Secara khusus LPKA memiliki tugas Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan,

pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi; Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan



▲ Bunda Forum Anak Daerah Lampung, Riana Sari Arinal memberikan cinderamata kepada Kepala LPKA Bandar Lampung, Sambiyu

dan pelayanan kesehatan; Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan.

LPKA Kelas II Bandar Lampung telah melakukan Kerjasama dengan stakeholder dalam pelaksanaan Pembinaan dan Perawatan meliputi:

- a. Pembinaan Kepribadian melalui program Salam Pas dan Laboratorium Evaluasi Pemasarakatan (LEP) yang dilaksanakan oleh seluruh Petugas LPKA;
- b. UPT Bapas Wilayah Lampung dalam pelaksanaan Pos Bapas;
- c. Pendidikan formasl SD, SMP, SMA dan Kepramukaan yang bekerja sama dengan Yayasan Dwi Mulya;
- d. Pembinaan Kerohanian yang bekerja sama dengan Pondok Pesantren Darul Muttaqin;
- e. Pembinaan kemandirian dan keterampilan bebek petelur, merangkai papan bunga, pelatihan las, pelatihan produksi bubuk kopi, kerajinan tangan berbahan kayu, , pelatihan pertanian dan perkebunan yang bekerja sama dengan CV Ramones Art;
- f. Pelayanan Kesehatan bekerja sama dengan Rumah Sakit Ahmad Yani Metro, Rumah Sakit dadi Tjokrodipo Bandar Lampung;
- g. Pos Pelayanan Kesehatan yang bekerja sama dengan Puskesmas Tegineneng;
- h. Penyuluhan Kesehatan kepada ABH yang bekerjasama dengan PKBI;
- i. Kerjasama dengan WIBER (Wadah Indonesia Bersatu) dalam bidang Pemberdayaan serta Pendidikan bagi ABH;

Selain itu, pada Pada peringatan Hari Anak Nasional tahun 2023 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung telah mengusulkan Remisi Khusus Hari Anak Nasional kepada 51 ABH dengan rincian 39 ABH telah mendapat SK remisi dan 12 ABH menunggu SK Remisi Tahap 2.



10/07



Keren, Produk Tradisional Khas Indonesia Bisa Jadi Merek Internasional

Pemerintah Indonesia membuka peluang bagi barang dan jasa khas atau tradisional Indonesia untuk didaftarkan sebagai merek internasional. Hal itu dimungkinkan karena adanya aksesinya Nice Agreement tentang Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa. Nice Agreement merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang klasifikasi internasional terhadap barang dan jasa dengan tujuan pendaftaran merek.

27/07



Bakti Sosial dan Jalan Sehat, Kanwil Lampung Semarakkan Hari Jadi Kemenkumham ke-78

Bakti sosial menjadi salah satu rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kemenkumham Ke-78 yang bertujuan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar. Di lingkungan sekitar Kantor Wilayah, mereka berbagi kebahagiaan dengan mendistribusikan makanan kepada warga yang membutuhkan. Antusiasme masyarakat menyambut baik kehadiran pegawai Kemenkumham yang turut peduli dengan kesejahteraan mereka.

02/08



Lakukan Penyuluhan Hukum Serentak, Penyuluh Hukum Kanwil Lampung adakan sosialisasi UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP bersama LKBH SPSI

Kegiatan penyuluhan hukum serentak merupakan rangkaian acara dalam memeriahkan perayaan Hari Dharma Karya Dhika ke-78. Hal ini merupakan langkah besar yang dilakukan oleh BPHN untuk mengintruksikan kepada Kantor Wilayah Kemenkumham se-Indonesia untuk melakukan Penyuluhan Hukum Serentak terkait dengan dengan Tema "Sosialisasi UU No. 1 Tahun 2023"

03/08



Tata Kelola Pengadaan ASN Terbaik, Kemenkumham Terima Penghargaan dari Menpan RB

Kemenkumham menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KPAN-RB) sebagai Instansi Pemerintah dengan Tata Kelola Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Terbaik. Kemenkumham menempati posisi pertama pada kategori Sinergitas Pengadaan ASN dan Tata Kelola Sekolah Kedinasan yang Informatif Tahun 2023

04/08



Kemenkumham Terima Opini WTP 14 Kali Berturut-turut

Kemenkumham menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kemenkumham tahun 2022. Yasonna H. Laoly meminta segenap jajaran Kemenkumham untuk mempertahankan opini WTP, serta menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK. Yasonna tidak ingin ada temuan berulang pada pemeriksaan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.

07/08



Ditjen HAM dengan FNF Kukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Lampung

Tindak lanjut dari ditunjuknya Kemenkumham sebagai Titik Fokus Nasional Bisnis dan HAM. Kanwil Kemenkumham Lampung membentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM di Daerah Provinsi Lampung. "Kanwil memiliki tugas dan fungsi untuk memberi panduan bagi pelaku usaha, melakukan pengawasan, serta kontrol dalam implementasi HAM pada kegiatan bisnisnya. Harapannya, para pekerja dan buruh akan memperoleh hak-haknya", ujar Kakanwil Sorta.

08/08



Penguatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama di Jajaran Kanwil Lampung, Kakanwil Sorta : Timba Ilmu serta Pengalaman

Adanya peraturan baru Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 juga menjadi perhatian Kakanwil Sorta dan berharap seluruh jajaran dapat memahami serta beradaptasi dengan baik karena hal tersebutlah yang menjadi tolak ukur dan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

17/08



175.510 Narapidana Terima Remisi Umum HUT Ke-78 RI, 2.606 Langsung Bebas

Rasa syukur dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Republik Indonesia dirasakan segenap lapisan masyarakat, tidak terkecuali para Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pada peringatan kemerdekaan ini, sebanyak 175.510 narapidana menerima Remisi Umum (RU) Tahun 2023 dan 2.606 di antaranya langsung bebas.



Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

yang ada di Kementerian Hukum dan HAM

Apa tugas dan kewenangannya? Bagaimana cara jadi PPNS?

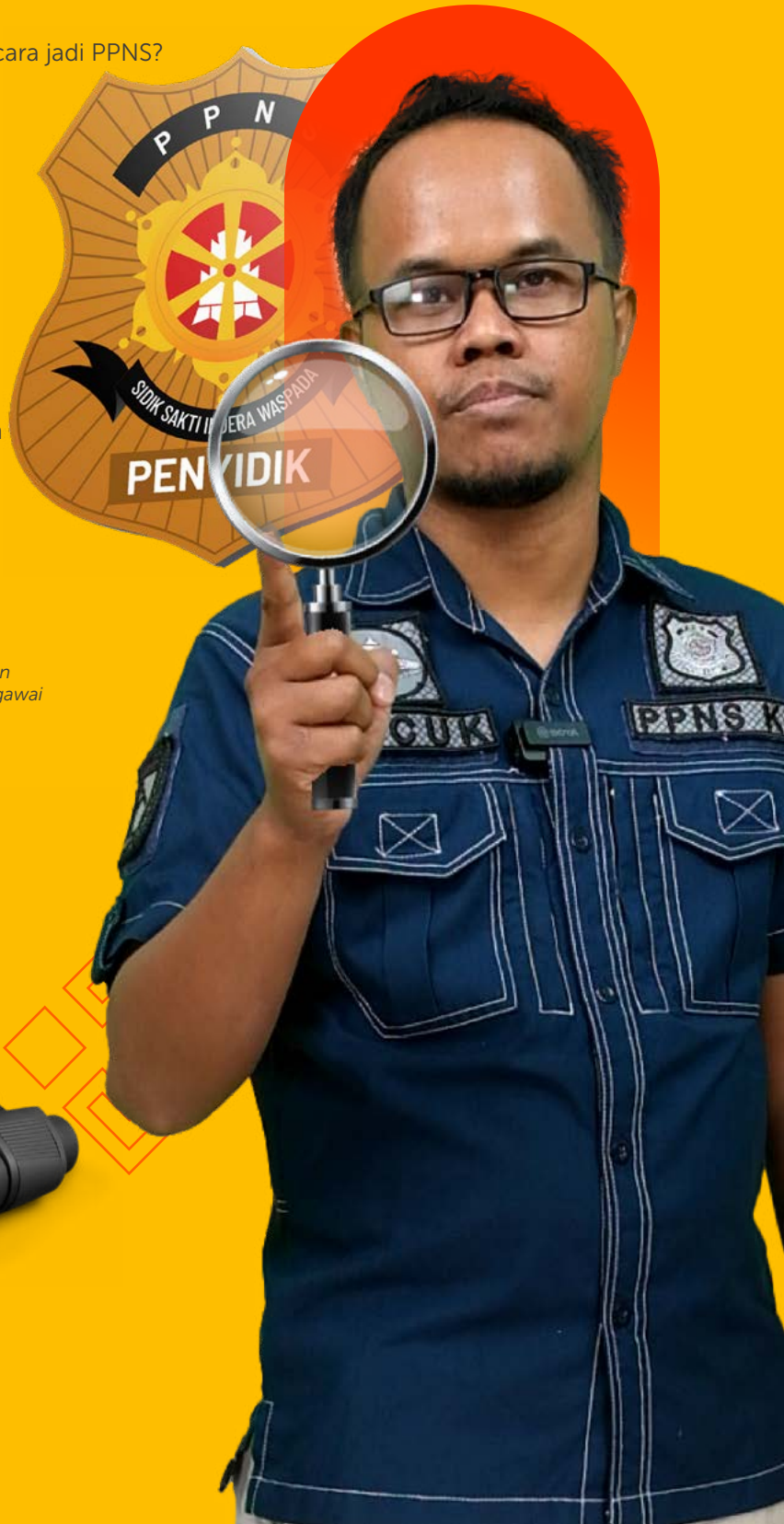
[pelajari lebih lanjut! >](#)

Apa itu PPNS ?

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing

Peraturan Pemerintah No.23 Th. 2012

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa



Tugas dan Kewenangan PPNS Kemenkumham?

melakukan penyidikan terhadap kasus pidana tertentu yang terjadi dalam lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Contohnya seperti:

1. PPNS KI (Kekayaan Intelektual) bertugas untuk melakukan tindakan Penyidikan yang meliputi pemeriksaan dan pemanggilan terkait tindak pidana terhadap pelanggaran Merek, Paten, Hak Cipta, Rahasia Dagang, DTLST, dan KIK;
2. PPNS Keimigrasian bertugas untuk melakukan penyidikan terkait tindak pidana terhadap pelanggaran keimigrasian dalam UU Keimigrasian yang mencakup antara lain: memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian, penyitaan dan pemeriksaan lainnya.



Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Pelanggaran Kekayaan Intelektual oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Anom Wibowo



PPNS Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Warga Negara Asing yang diduga melanggar UU No. 6 Th. 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 126 Huruf C

Cara Jadi PPNS?

Pengangkatan PPNS Persyaratan:

1. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
2. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
3. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
4. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
5. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
6. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Selain memenuhi persyaratan tersebut calon pejabat PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.5 Th. 2016

Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil



Prosedur:

1. Prosedur
2. Koordinator mengunggah dokumen persyaratan pada laman: <https://ppns.ahu.go.id/> yang terdiri dari Surat Permohonan Pengangkatan dari Koordinator PPNS setiap Kementerian /Lembaga dan Persyaratan pengangkatan PPNS;
3. Ditjen AHU melakukan pemeriksaan kelengkapan data pengangkatan PPNS;
4. Apabila dokumen persyaratan tidak lengkap, koordinator diberitahukan secara elektronik untuk melengkapi dokumen persyaratan;
5. Bila dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, pemohon dapat langsung mencetak Surat Keputusan Pengangkatan PPNS dan Petikan SK Pengangkatan Penyidik PPNS;
6. Apabila dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, Ditjen AHU dapat mencetak Kartu Tanda Penyidik untuk diberikan kepada pemohon.

Permohonan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PPNS

Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang telah memenuhi persyaratan untuk dilantik dan diambil sumpahnya.



Persyaratan

1. Surat pengajuan pengangkatan calon Pejabat PPNS diajukan oleh pimpinan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi PNS yang bersangkutan;
2. Surat Keputusan Menteri tentang pengangkatan Pejabat PPNS;
3. Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan Pejabat PPNS yang telah dilegalisasi;
4. Foto Copy KTP;
5. Foto Copy Kartu Keluarga;
6. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 sebanyak 5 (lima) lembar.

Prosedur

1. Permohonan untuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI c.q. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan persyaratan, dibuat dalam 1 (satu) rangkap dan diserahkan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada petugas loket pelayanan/ Bagian Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung;
2. Permohonan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.



Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS

PNS yang telah diangkat menjadi Pejabat PPNS diberi kartu tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri.

Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsi



Hidup ini kesempatan dan akan berlalu tidak dapat dikembalikan, maka pergunakan waktu sebaik mungkin agar tidak ada penyesalan.

Selagi ada kesempatan mari pikirkan, inginkan dan katakan serta lakukan yang baik, benar, berguna dan membangun.

Setiap perkataan dan perbuatan kepada siapapun akan membawa akibat dan balasan untuk diri kita sendiri, bila ditabur kebaikan maka kebaikan juga yang akan kita tuai di suatu saat yang tepat.

”

- Sorta Delima Lumban Tobing -



7 KARAKTER PRIBADI AGUNG UNTUK MEWUJUDKAN KEAGUNGAN ORGANISASI

1. Bekerja dan berkarya dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT dan rakyat
2. Meyakini selalu diawasi Allah SWT dan menyadari bahwa jika berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan dan berbuat buruk pasti dibalas keburukan
3. Semangat belajar tiada akhir dan menciptakan beragam inovasi untuk kemudahan layanan
4. Hidup sederhana dengan *take home pay* yang halal
5. Mengeliminasi keserakahan terhadap kekuasaan dan harta
6. Merespon semua keberhasilan dengan syukur dan rendah hati
7. Menyikapi kegagalan dengan berfikir positif tentang hikmah sembari mencari solusi tepat



RAZILU

INSPEKTUR JENDERAL KEMENKUMHAM RI

TOLAK GRATIFIKASI

DALAM BENTUK APAPUN



**ATAU LAPORKAN KE
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PUSAT
KEMENKUMHAM**



upg.kemenkumham.go.id



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**SEMAKIN
PASTI**

**REFORMASI
HUKUM**



**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**